|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Draf RPOJK Perubahan Ketiga POJK 71 2016** | | | | | |
| **Batang Tubuh POJK 71/2016 & POJK 5/2023** | **RPOJK** | **Penjelasan** | **Instansi/**  **Satuan Kerja** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 71/POJK.05/2016  TENTANG  KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN | RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR … TAHUN 2025  TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Menimbang: | Menimbang: |  |  |  |  |
| 1. bahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian; | 1. bahwa setiap penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung akan menyebabkan pihak tersebut menjadi pihak terkait dari perusahaan; |  |  |  |  |
| 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan untuk melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam menanggung risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; | 1. bahwa diversifikasi investasi dibutuhkan untuk menghindari risiko konsentrasi aset perusahaan, dengan tetap memperhatikan dukungan dan keberlanjutan dari lembaga jasa keuangan; 2. bahwa untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap investasi penyertaan langsung dan investasi pada pihak terkait perusahaan; |  |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; |  |  |  |  |
| Mengingat | Mengingat |  |  |  |  |
| Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
| Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |  |
|  | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Memutuskan: |  |  |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI. | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |  |
| Pasal 1 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. |  |  |  |  |  |
| 1. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. |  |  |  |  |  |
| 1. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas. |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas. |  |  |  |  |  |
| 1. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |  |  |  |  |  |
| 1. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan tanpa melalui penawaran umum dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. |  |  |  |  |  |
| 1. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. |  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Kelompok Penerima Investasi adalah 2 (dua) atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima investasi dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |  |  |
| KESEHATAN KEUANGAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |  |
| Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 2 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemegang polis dan tertanggung, Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Solvabilitas; |  |  |  |  |  |
| 1. cadangan teknis; |  |  |  |  |  |
| 1. kecukupan investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. Ekuitas; |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan; |  |  |  |  |  |
| 1. Aset asuransi yang dikaitkan dengan investasi; dan |  |  |  |  |  |
| 1. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |  |
| Tingkat Solvabilitas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 3 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari MMBR. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas internal. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). |  | Profil risiko Perusahaan mempertimbangkan antara lain letak geografis, produk Perusahaan, rencana bisnis, dan klaim experience dalam mengukur profil risiko serta mempertimbangkan skenario perubahan (*stress test*). Selain itu Perusahaan dapat mempertimbangkan risiko lain yang mungkin timbul antara lain berasal dari rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan. |  |  |  |
| 1. OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan setiap saat harus memenuhi Target Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Solvabilitas internal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 4 |  |  |  |  |  |
| 1. Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari: |  | Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar merupakan bagian dari risiko aset dan Liabilitas yang terdapat dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank. |  |  |  |
| 1. risiko kredit; |  |  |  |  |  |
| 1. risiko likuiditas; |  |  |  |  |  |
| 1. risiko pasar; |  |  |  |  |  |
| 1. risiko asuransi; dan |  |  |  |  |  |
| 1. risiko operasional. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari Subdana. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |  |
| Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 5 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. |  | Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank; |  | Yang dimaksud “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. |  |  |  |
| 1. saham yang tercatat di bursa efek; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. MTN; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. reksa dana; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. efek beragun aset; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO); |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*); |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. emas murni; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. dihapus |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pinjaman polis. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. obligasi daerah; dan/atau |  | Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. |  |  |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. |  | Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. saham yang tercatat di bursa efek; |  |  |  |  |  |
| 1. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  |  |  |  |  |
| 1. reksa dana; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek. |  |  |  |  |  |
| 1. Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 5A |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 5B |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa: |  |  |  |  |  |
| 1. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l. |  |  |  |  |  |
| 1. Dihapus |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 6 |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada obligasi korporasi yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK. |  | Yang dimaksud dengan “*investment grade*” adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK atau setara BBB. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. MTN memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. MTN memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. MTN dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. MTN diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat. |  | Yang dimaksud “lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat” adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; |  |  |  |  |  |
| 1. dijual melalui penawaran umum; dan |  |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bagi reksa dana yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. bagi reksa dana penyertaan terbatas, hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan ketentuan penempatan investasi surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi surat berharga negara bagi lembaga keuangan nonbank. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa *repurchase agreement* (REPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |  |  |  |
| 1. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. transaksi dalam bentuk beli surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan; |  |  |  |  |  |
| 1. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; |  |  |  |  |  |
| 1. nilai *repurchase agreement* (REPO) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. transaksi *repurchase agreement* (REPO) terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4). |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir Pihak lain. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. merupakan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. perusahaan pembiayaan dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama; |  |  |  |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan |  |  |  |  |  |
| 1. disimpan di: |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian; |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak lain yang memperoleh izin atau |  |  |  |  |  |
| 1. persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan, dengan syarat diasuransikan kepada Perusahaan lain. |  |  |  |  |  |
| 1. Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  | Ayat 11 baru  Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n wajib memenuhi ketentuan: | Perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian antara lain perusahaan penyedia jasa untuk mendukung:   1. pengembangan produk asuransi 2. proses seleksi risiko (*underwriting*); 3. pemasaran produk asuransi; dan 4. penanganan klaim. |  |  |  |
|  | 1. jumlah investasi seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas; |  |  |  |  |
|  | 1. dilakukan pada perseroan terbatas berupa lembaga jasa keuangan atau perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian; dan |  |  |  |  |
|  | 1. mendapatkan persetujuan dari OJK. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 7 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam hal obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penempatan dapat dilakukan dengan ketentuan: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan |  |  |  |  |  |
| 1. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 8 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan |  |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai emiten dan transaksi saham tersebut dapat diakses di Indonesia. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; |  |  |  |  |  |
| 1. dijual melalui penawaran umum; dan |  |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi berdomisili; |  |  |  |  |  |
| 1. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan melalui penawaran umum; |  |  |  |  |  |
| 1. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan |  |  |  |  |  |
| 1. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 9 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham dan/atau obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham dan/atau obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d yang dicatatkan di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK atau memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dijual melalui penawaran umum. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dan ayat (3) huruf d berdenominasi rupiah, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 10 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 11 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa deposito berjangka pada BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia, untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa *repurchase agreement* (REPO), untuk setiap counterparty paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; | dihapus |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf m; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (executing), untuk setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan. |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf s, dan huruf t, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa: |  |  |  |  |  |
| 1. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d; dan |  |  |  |  |  |
| 1. MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, |  |  |  |  |  |
| yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak dikenakan: |  |  |  |  |  |
| 1. batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f serta batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan |  |  |  |  |  |
| 1. persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan: |  |  |  |  |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan |  |  |  |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu obligasi dan/atau MTN yang dijamin. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 12 |  |  |  |  |  |
| 1. Batasan maksimum investasi Perusahaan atas aset selain Subdana ditetapkan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi; dan |  | Contoh:  PT Asuransi X memiliki Ekuitas (tidak termasuk Ekuitas unit syariah) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), Ekuitas unit syariah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan pinjaman subordinasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Perusahaan memiliki investasi pada Pihak Terkait berupa obligasi PT Pembiayaan X1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank X2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham PT Bank X2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian:   * Total investasi pada Pihak Terkait = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ÷ Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen). * Batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara presentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi. Adapun batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal = 10% (sepuluh persen) x (Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah] + Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah]) = Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). * Terdapat kelebihan investasi pada Pihak Terkait, secara persentase = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen) - 10% (sepuluh persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) atau secara nominal sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp5.010.000.000,00 (lima miliar sepuluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. investasi pada: 2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; atau 3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,   paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi yang bersumber dari selain Subdana. |  | PT Asuransi Y memiliki total investasi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan memiliki investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait berupa obligasi PT Pembiayaan Y1 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank Y2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham PT Bank Y2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian:   * Total investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi = (Rp45.000.000.000,00 [empat puluh lima miliar rupiah] ÷ Rp150.000.000.000,00 [seratus lima puluh miliar rupiah]) x 100% (seratus persen) = 30% (tiga puluh persen). * Batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara presentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi. Adapun batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara nominal = 25% (dua puluh lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah. * Terdapat kelebihan investasi pada satu Kelompok Penerima Investai yang bukan Pihak Terkait, secara persentase = 30% (tiga puluh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 5% (lima persen) atau secara nominal sebesar 5% (lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). |  |  |  |
|  | Ayat 1a baru  Penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11), dikecualikan dari ketentuan perhitungan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan memiliki unit syariah, Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Ekuitas pada unit syariah. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan. |  | PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan pinjaman subordinasi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Adapun total investasi pada seluruh Pihak Terkait sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Dengan demikian:   * pinjaman subordinasi yang diperhitungkan dalam penentuan batasan maksimum investasi hanya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sehingga hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) + Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) = Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah). * batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal sebesar 10% (sepuluh persen) x (Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah]+ Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah]) = Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). * persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 [tiga puluh lima miliar rupiah] ÷ Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)) x 100% (seratus persen) = 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen). |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi atas aset dari selain Subdana yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi pada: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, |  |  |  |  |  |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |  |  |
| 1. Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi atas aset dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut: |  | Penilaian pinjaman subordinasi Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  |  |  |
| 1. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi pada Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk penempatan investasi pada Pihak Terkait; dan |  | Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi X tidak memiliki pinjaman subordinasi dan investasi pada Pihak Terkait. Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi X melakukan transaksi penempatan investasi kepada Pihak Terkait sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Dengan demikian:   * Persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = (Rp40.000.000.000,00 [empat puluh miliar rupiah] ÷ Rp300.000.000.000,00 [tiga ratus miliar rupiah]) x 100% (seratus persen) = 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen). * Pelanggaran batasan maksimum investasi = 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen) - 10% (sepuluh persen) = 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi pada saat penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penempatan investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait. |  | Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Y memiliki total investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Y hanya memiliki investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi Terkait sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Y melakukan transaksi penempatan investasi kepada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dengan demikian:   * Persentase penempatan investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = (Rp40.000.000.000,00 [empat puluh miliar rupiah] ÷ Rp150.000.000.000,00 [seratus lima puluh miliar rupiah]) x 100% (seratus persen) = 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen). * Pelanggaran batasan maksimum investasi = 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus puluh miliar rupiah) = Rp2,5 miliar (dua koma lima miliar rupiah). |  |  |  |
| 1. Investasi atas aset dari selain Subdana pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan: |  |  |  |  |  |
| 1. penurunan Ekuitas Perusahaan dan/atau pinjaman subordinasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perubahan nilai tukar; |  | Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan. |  |  |  |
| 1. perubahan nilai wajar aset; |  | Yang dimaksud dengan “perubahan nilai wajar aset” antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*). |  |  |  |
| 1. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait; dan/atau |  | Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas penempatan investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi. |  |  |  |
| 1. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, |  | Yang dimaksud dengan “perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi, termasuk pemberlakuan Peraturan OJK ini. |  |  |  |
| dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi dan bukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). |  |  |  |  |  |
| 1. Pelampauan batasan maksimum investasi atas aset dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sebagai berikut: |  | Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada OJK secara bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala Perusahaan. Berdasarkan laporan bulan Januari 2022 dan Februari 2022 diketahui data PT Asuransi X sebagai berikut (angka dalam miliar rupiah):    Selama bulan Februari 2022 PT Asuransi X tidak melakukan penambahan investasi pada Pihak Terkait maupun bukan Pihak Terkait, sehingga perubahaan nilai investasi hanya disebabkan oleh perubahan harga dari masing-masing investasi. Dengan demikian, terdapat pelampauan batasan maksimum investasi sebagai berikut:   1. Investasi pada Pihak Terkait   Pelampauan batasan maksimum investasi = ([Rp35.000.000.000,00 {tiga puluh lima miliar rupiah} ÷ Rp305.000.000.000,00 {tiga ratus lima miliar rupiah}] x 100% [seratus persen]) – 10% (sepuluh persen) = 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen), atau secara nominal sebesar 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) x Rp305.000.000.000,00 (tiga ratus lima miliar rupiah) = Rp4.514.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).   1. Investasi pada bukan Pihak Terkait   Investasi pada saham PT C = ([Rp180.000.000.000,00 {seratus delapan puluh miliar rupiah} ÷ Rp705.000.000.000,00 {tujuh ratus miliar rupiah}] x 100% [seratus persen]) – 25% (dua puluh lima persen) = 0,53% atau secara nominal sebesar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) x Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).   1. Investasi pada Kelompok Penerima Investasi   D = ([Rp180.000.000.000,00 {seratus delapan puluh miliar rupiah} ÷ Rp705.000.000.000,00 {tujuh ratus miliar rupiah}] x 100% [seratus persen]) – 25% (dua puluh lima persen) = 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) atau secara nominal sebesar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) x Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah. |  |  |  |
| 1. sebesar selisih lebih dari persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi yang tercatat pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk investasi pada Pihak Terkait; dan |  |  |  |  |  |
| 1. sebesar selisih lebih dari persentase investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi yang bersumber selain dari Subdana yang tercatat pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf l, penempatan investasi tersebut hanya dapat dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK dan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. | dihapus | Dihapus. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nominal aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tetap diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. |  |  |  |  |  |
| 1. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 13 |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait meliputi: |  |  |  |  |  |
| 1. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang memiliki pengendali yang sama dengan Perusahaan; |  | Contoh:  PT A dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan PT Asuransi B, sehingga PT A disebut sebagai Pihak Terkait. |  |  |  |
| 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan pejabat eksekutif Perusahaan; |  | Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif Perusahaan” yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara. |  |  |  |
| 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, secara horizontal atau vertikal: |  | Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 7. suami atau istri; 8. mertua; 9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; |  |  |  |  |  |
| 1. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; |  | Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang: 2. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan 3. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kontrak investasi kolektif dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut, kecuali dalam hal kontrak investasi kolektif tersebut memiliki underlying asset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; | Dihapus. | Dihapus. |  |  |  |
| 1. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i; |  | Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:   1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis penerima bantuan keuangan; 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan: 3. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan 4. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau 5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi. |  |  |  |
| 1. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; |  | Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi). |  |  |  |
| 1. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  | Ayat 1a baru  Penetapan Pihak Terkait untuk penempatan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif dilakukan berdasarkan *underlying asset* dari kontrak investasi kolektif | Contoh:  Perusahaan Asuransi A dan perusahaan B merupakan Pihak Terkait.  Perusahaan Asuransi A melakukan penempatan investasi pada reksa dana dimana *underlying* asetnya adalah perusahaan B sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana.  Jika nilai aktiva bersih reksa dana tersebut diasumsikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan Perusahan memiliki unit penyertaan sebanyak 100 (seratus) unit dari total 2000 (dua ribu) unit penyertaan maka investasi pada Pihak Terkait atas pembelian reksa dana tersebut = (100/2000) x 10% x Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) = Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah). |  |  |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: |  | Yang dimaksud dengan “pengendalian secara bersama-sama” adalah pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing. Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:   1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali; 2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali; 3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali, yaitu: 4. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali; 5. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi; 6. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali; 7. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau 8. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus; 9. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali; 10. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu; 11. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali; 12. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (ultimate subsidiary); dan/atau 13. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.   Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara. |  |  |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis Perusahaan; |  | Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |  |  |  |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Perusahaan secara langsung atau tidak langsung: |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersamasama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis perusahaan lain; |  | Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan. |  |  |  |
| 1. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersamasama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |  |  |  |
| 1. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (acting in concert), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersamasama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b; |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis operasional atau kebijakan strategis keuangan perusahaan lain. |  |  |  |  |  |
| 1. Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf m dikecualikan untuk: |  |  |  |  |  |
| 1. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); | 1. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m dan huruf o sampai dengan huruf t; | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan/atau perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan/atau |  | Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing perusahaan. |  |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 13A |  |  |  |  |  |
| 1. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait meliputi: |  |  |  |  |  |
| 1. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada penerima investasi lain; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau |  | Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:   1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan; 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan: 3. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan/atau 4. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau 5. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi. |  |  |  |
| 1. 1 (satu) pihak yang sama melakukan penjaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban beberapa penerima investasi dalam hal penerima investasi gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Hubungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan perusahaan penjaminan, sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan |  |  |  |  |  |
| 1. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 13B |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan/atau pihak lain. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dikecualikan untuk penempatan investasi berupa: |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  | Huruf d baru  kontrak investasi kolektif yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | Kontrak investasi kolektif yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |  |
| 1. Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan |  |  |  |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu surat berharga yang dijamin. |  |  |  |  |  |
|  | Ayat (4) baru  Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait dikecualikan untuk penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11). | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 13C |  |  |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a wajib paling sedikit memuat tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi dan target waktu penyelesaian. |  | Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada OJK. |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); atau |  |  |  |  |  |
| 1. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. |  |  |  |  |  |
| 1. Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling lambat 1 (satu) bulan; |  |  |  |  |  |
| 1. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; atau |  |  |  |  |  |
| 1. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d dan/atau huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan, |  |  |  |  |  |
| sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan OJK dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terakhir penyelesaian pelampauan batasan investasi. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 14 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset kepada pemegang saham atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm’s length transaction*). |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal pinjaman dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 15 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai seluruh bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 per tanggal laporan posisi keuangan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 16 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Ketentuan mengenai pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk untuk penempatan pada jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |  |  |
| Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 17 |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. kas dan bank; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan premi reasuransi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. aset reasuransi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan klaim koasuransi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan klaim reasuransi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan investasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau |  | Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi overriding. |  |  |  |
| 1. aset hak guna. |  | Yang dimaksud dengan “aset hak guna” adalah aset yang diakui Perusahaan berdasarkan kontrak sewa. |  |  |  |
| 1. Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal: |  |  |  |  |  |
| 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau |  |  |  |  |  |
| 1. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |  |  |  |
| 1. aset reasuransi, terdiri dari: |  |  |  |  |  |
| 1. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan |  |  |  |  |  |
| 1. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan: |  |  |  |  |  |
| 1. hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akusisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*); |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (deferred acquisition cost) atas PAYDI yang sama; dan |  |  |  |  |  |
| 1. untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; |  |  |  |  |  |
| 1. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan; |  |  |  |  |  |
| 1. biaya akuisisi yang ditangguhkan (deferred acquisition cost), dengan ketentuan: |  |  |  |  |  |
| 1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (back-end loading); 2. Perusahan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsuranc*e) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan |  |  |  |  |  |
| 1. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. aset hak guna hanya diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 huruf c) dan huruf j angka 3 ditetapkan oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |  |  |
| Status Aset Yang Diperkenankan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 18 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus: |  |  |  |  |  |
| 1. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang; |  |  |  |  |  |
| 1. tidak dalam sengketa; |  |  |  |  |  |
| 1. tidak sedang dijadikan jaminan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. tidak sedang diblokir oleh Pihak yang berwenang. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |  |  |
| Liabilitas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 19 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, termasuk cadangan teknis. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis produk asuransi. |  |  |  |  |  |
| 1. Pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aktuaris Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 19A |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) untuk menjaga kondisi likuiditas Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pedoman transaksi repurchase agreement bagi lembaga jasa keuangan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 20 |  |  |  |  |  |
| 1. Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: |  |  |  |  |  |
| 1. cadangan premi: |  |  |  |  |  |
| 1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu; dan |  | Yang dimaksud dengan “manfaat lain” misalnya pengembalian premi (*return of premium*) dan *no-claim* bonus. |  |  |  |
|  | Angka 3 baru  3. untuk PAYDI | Cadangan atas PAYDI misalnya cadangan untuk produk unit-link dan universal life. |  |  |  |
| 1. cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. cadangan atas PAYDI; | Dihapus. | Dihapus. |  |  |  |
| 1. cadangan klaim; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. cadangan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*). |  | Yang dimaksud dengan “risiko bencana” adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Pembentukan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan marjin risiko. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*). |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Cadangan atas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah: | Cadangan premi untuk PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 adalah: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. cadangan akumulasi dana untuk PAYDI yang tidak digaransi; |  |  |  |  |  |
| 1. cadangan atas unsur investasi untuk PAYDI yang digaransi; dan |  |  |  |  |  |
| 1. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI. |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. cadangan klaim dalam proses penyelesaian; |  |  |  |  |  |
| 1. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan |  |  |  |  |  |
| 1. cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus. |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 21 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal ditemukan ketidakwajaran cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis yang dibentuk oleh Perusahaan, OJK dapat: |  |  |  |  |  |
| 1. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang atas jumlah cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau |  |  |  |  |  |
| 1. meminta dilakukan penelaahan (review) atas cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan teknis tersebut oleh Pihak independen atas beban Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menunjuk Pihak independen paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan penelaahan (review) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 22 |  |  |  |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Surat Edaran OJK. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |  |  |  |
| Pinjaman Subordinasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 23 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas jika pinjaman tersebut memenuhi ketentuan: |  |  |  |  |  |
| 1. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas |  |  |  |  |  |
| 1. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat |  |  |  |  |  |
| 1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan jika tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal |  |  |  |  |  |
| 1. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; |  |  |  |  |  |
| 1. tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu per lima) dari tingkat suku bunga Bank Indonesia pada saat ditandatanganinya perjanjian; dan |  |  |  |  |  |
| 1. pinjaman subordinasi diberikan dalam bentuk setoran tunai. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 24 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Perusahaan dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan |  |  |  |  |  |
| Kecukupan Investasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 25 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung. |  | Yang dimaksud dengan “Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung” antara lain titipan premi. |  |  |  |
| 1. Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |  |  |
| PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 26 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI wajib memisahkan pencatatan dan pelaporan aset dan Liabilitas Subdana dengan aset dan Liabilitas selain Subdana. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas Subdana kepada aset dan Liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Asuransi membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana maka: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pemisahan pencatatan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan Asuransi; |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dibentuk Perusahaan Asuransi; dan |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi wajib mengelola bagian Premi yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi, sesuai dengan Subdana yang dipilih Pemegang Polis atau Tertanggung. |  |  |  |  |  |
| 1. Larangan pengalihan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan untuk pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain yang dilakukan untuk penyesuaian portofolio investasi Subdana yang tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung. |  | Yang dimaksud dengan “penyesuaian portofolio investasi Subdana” antara lain pengurangan atas investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait dari 1 (satu) Subdana yang telah terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait kepada Subdana lain yang belum terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait. Yang dimaksud dengan "tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung" adalah pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi.  Contoh 1:  Subdana 1 memiliki investasi pada saham A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu pihak sedangkan Subdana 2 belum memiliki investasi pada saham A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan harga wajar pada waktu dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan nilai yang sama. Sebelum dilakukan pengalihan aset, Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham A.  Contoh 2:  Subdana 1 membutuhkan likuiditas sedangkan Subdana 2 memiliki likuiditas yang cukup, maka Perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan menggunakan nilai wajar. Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 27 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Aset Subdana wajib ditempatkan pada jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; |  |  |  |  |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank; |  |  |  |  |  |
| 1. saham yang tercatat di bursa efek; |  |  |  |  |  |
| 1. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek; |  |  |  |  |  |
| 1. MTN; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; |  |  |  |  |  |
| 1. reksa dana; |  |  |  |  |  |
| 1. efek beragun aset; |  |  |  |  |  |
| 1. *repurchase agreement* (REPO); dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. emas murni. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Subdana dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. kas dan bank; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan premi penutupan langsung; |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan investasi; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. tagihan hasil investasi. |  |  |  |  |  |
| 1. Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis. |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Subdana dari PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dasar penilaian setiap jenis aset Subdana berupa aset investasi dan aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 28 | Pasal 28 | Cukup jelas. |  |  |  |
| Aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 | Ayat (1) baru  Aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:   1. Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (9); dan 2. Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 |  |  |  |  |
|  | Ayat (2) baru  Dalam hal aset Subdana ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |
|  | 1. bagi reksa dana yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; |  |  |  |  |
|  | 1. bagi reksa dana penyertaan terbatas, tercatat di OJK; |  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan mendapatkan laporan investasi dari manajer investasi berupa rincian seluruh *underlying asset* reksa dana tersebut secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali; dan |  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan memperhitungkan *underlying* *asset* dari reksa dana yang merupakan Pihak Terkait Perusahaan sebagai perhitungan investasi pada Pihak Terkait. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 29 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI yang menggunakan mata uang rupiah. | Dihapus. | Dihapus. |  |  |  |
| 1. Penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI yang menggunakan mata uang asing dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total investasi seluruh Subdana. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 29A |  |  |  |  |  |
| 1. Penempatan investasi atas aset dari Subdana wajib memenuhi batasan investasi sebagai berikut: |  | Yang dimaksud dengan “nilai aset bersih” adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masing-masing Subdana. |  |  |  |
| 1. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan Subdana paling besar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi; dan | investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan Subdana paling besar 10% (sepuluh persen) dari nilai total investasi masing-masing Subdana; dan |  |  |  |  |
| 1. investasi pada; |  |  |  |  |  |
| 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; atau |  |  |  |  |  |
| 1. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, |  |  |  |  |  |
| paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai aset bersih masing-masing Subdana. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan memiliki unit syariah, Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Ekuitas pada unit syariah. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 13B. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 13B. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal aset Subdana ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j, reksa dana dimaksud hanya dapat merupakan reksa dana yang memiliki aset yang mendasari (underlying asset) berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset bersih reksa dana dan Perusahaan memiliki informasi rincian seluruh underlying asset reksa dana tersebut. | Dihapus. | Dihapus. |  |  |  |
| 1. Dalam hal penempatan aset investasi Subdana melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat: |  | Yang dimaksud dengan “hari bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek. |  |  |  |
| 1. 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan; atau |  |  |  |  |  |
| 1. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 30 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset Subdana pada Bank Kustodian. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara Republik Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |  |  |
| TRANSAKSI DERIVATIF |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 31 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali: |  |  |  |  |  |
| 1. kontrak opsi jual saham atas saham yang dimiliki yang tercatat di bursa efek di Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. instrumen derivatif yang diperoleh Perusahaan sebagai instrumen yang melekat pada saham, obligasi korporasi, atau surat berharga negara yang tercatat di bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f; atau |  |  |  |  |  |
| 1. instrumen derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilai atas risiko mata uang dan/atau tingkat bunga. |  |  |  |  |  |
| 1. Transaksi instrumen derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan counterparty yang paling rendah memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada surat berharga negara, saham, atau obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara terpisah dari surat berharga negara, saham, atau obligasi korporasi yang bersangkutan. |  |  |  |  |  |
| 1. Transaksi derivatif atau instrumen derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan direksi atau yang setara. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 32 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melaporkan setiap transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi. |  |  |  |  |  |
| 1. Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan: |  |  |  |  |  |
| 1. hasil kajian/analisis tentang perlunya lindung nilai; |  |  |  |  |  |
| 1. perjanjian transaksi derivatif; |  |  |  |  |  |
| 1. bukti peringkat pihak lain (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2); dan |  |  |  |  |  |
| 1. bukti persetujuan direksi atau yang setara. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |  |  |
| EKUITAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 33 |  |  |  |  |  |
| Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar:  a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;  b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi. | \*dicabut oleh POJK 23/2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 34 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Perusahaan yang memiliki unit syariah wajib memenuhi Ekuitas dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditambah Ekuitas bagi unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah. | Perusahaan yang memiliki unit syariah wajib memenuhi ketentuan Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ditambah Ekuitas minimum bagi unit syariah sebagai berikut:  a. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi unit syariah dari Perusahaan Asuransi; dan  b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi unit syariah dari Perusahaan Reasuransi. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 35 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34. | Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Peraturan OJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. |  |  |  |  |
| 1. Pembayaran dividen atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |  |  |
| DANA JAMINAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |  |
| Pembentukan Dana Jaminan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 36 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI ditambah 5% (lima persen) dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Premi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari premi reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 37 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a serta Premi Neto dan premi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Jaminan kurang daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam jenis: |  |  |  |  |  |
| 1. deposito, dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang pada saat penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun. |  |  |  |  |  |
| 1. Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |  |
| Penatausahaan Dana Jaminan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 38 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian. |  |  |  |  |  |
| 1. Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 39 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK; |  |  |  |  |  |
| 1. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud; |  |  |  |  |  |
| 1. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun Pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. jenis Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito; |  |  |  |  |  |
| 1. seri dari surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. nilai nominal Dana Jaminan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. tanggal jatuh tempo. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |  |
| Perubahan Dana Jaminan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 40 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana Jaminan berupa pembentukan, penambahan, penggantian, pemindahan, dan/atau pencairan Dana Jaminan. |  |  |  |  |  |
| 1. Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. penempatan baru deposito pada Bank dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. penempatan deposito pada Bank yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. penempatan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |  |  |  |
| 1. dari deposito menjadi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya; |  |  |  |  |  |
| 1. mengubah jangka waktu deposito pada Bank; |  |  |  |  |  |
| 1. mengubah Bank tempat penempatan deposito; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. menukarkan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan dipindah atau diganti. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam hal jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selisih lebih dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan dengan menyampaikan dokumen permohonan yang paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; |  |  |  |  |  |
| 1. persetujuan direksi atau yang setara atas pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 41 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis, dalam hal: |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 42 |  |  |  |  |  |
| 1. Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau tertanggung wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana Asuransi dan dana Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan. |  | Pengungkapan pemisahan aset dan Liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai pengungkapan pemisahan aset dan Liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 43 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan harus mempertahankan Aset Yang Diperkenankan dalam Dana Asuransi dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas Dana Asuransi. |  |  |  |  |  |
| 1. Liabilitas Dana Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari cadangan teknis, utang klaim, utang koasuransi, utang reasuransi, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB VIII |  |  |  |  |  |
| PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 44 |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; |  |  |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |  |  |  |
| 1. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. |  |  |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib: |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK; dan |  |  |  |  |  |
| 1. mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham. |  |  |  |  |  |
| (2A) Dalam hal akuntan publik memberikan *management letter* kepada Perusahaan, laporan keuangan tahunan wajib dilengkapi dengan *management letter*. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: |  |  |  |  |  |
| 1. profil Perusahaan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. surat pernyataan direksi atau yang setara; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan laba/rugi komprehensif; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan arus kas; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan perubahan Ekuitas; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan Tingkat Solvabilitas; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. perhitungan aset dan Liabilitas; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan keuangan PAYDI; |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan keuangan gabungan; dan |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. laporan tambahan. |  | Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh OJK. |  | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 44A |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, untuk: |  |  |  |  |  |
| 1. investasi atas aset selain Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan |  |  |  |  |  |
| 1. investasi atas aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1). |  |  |  |  |  |
| 1. Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan. |  |  |  |  |  |
| 1. Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak, nama Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK: |  |  |  |  |  |
| 1. laporan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi atas aset Subdana dan selain Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini; |  |  |  |  |  |
| 1. laporan penempatan investasi pada: |  |  |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait; |  |  |  |  |  |
| 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan |  |  |  |  |  |
| 1. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,   yang menerima investasi dari selain Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
| 1. laporan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi dari Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan: |  |  |  |  |  |
| 1. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d; atau |  |  |  |  |  |
| 1. sesuai dengan batas waktu yang diminta OJK apabila OJK meminta Perusahaan menyampaikan laporan tersebut. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 45 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d tidak termasuk laporan yang terkait dengan unit syariah dari Perusahaan dimaksud. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 46 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |  |
| Penyampaian Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 47 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK: |  |  |  |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 April tahun berikutnya; |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |  |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan |  |  |  |  |  |
| 1. laporan hasil penelaahan dan penilaian kewajaran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) paling lambat 30 Juni tahun berikutnya setelah periode laporan aktuaris yang dilakukan penelaahan dan penilaian. |  |  |  |  |  |
| 1. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |  |
| Pengumuman Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 48 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a yang memuat paling sedikit: |  |  |  |  |  |
| 1. posisi keuangan; |  |  |  |  |  |
| 1. kinerja keuangan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. kondisi kesehatan keuangan. |  |  |  |  |  |
| 1. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari ker.ja setelah pengumuman pada surat kabar. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d pada situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. |  |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK. |  |  |  |  |  |
| 1. Bentuk dan susunan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 49 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada situs web Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB IX |  |  |  |  |  |
| RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 50 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4): |  |  |  |  |  |
| 1. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan |  |  |  |  |  |
| 1. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. |  |  |  |  |  |
| 1. Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 51 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 52 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 53 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 54 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB IXA  KEBIJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERDAMPAK BENCANA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 54A |  |  |  |  |  |
| 1. OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas industri asuransi dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana. |  | Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan OJK berupa kebijakan untuk mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas industri asuransi serta bentuk pemberian relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| BAB X |  | BAB X |  |  |  |
| SANKSI |  | SANKSI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 55 |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (11), Pasal 10, Pasal 12 ayat (4), ayat (10), Pasal 13C ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 29A ayat (1), ayat (7), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 37 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), ayat (5), ayat (8), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), ayat (3), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (2A), ayat (3), ayat (6), Pasal 44A ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 49 dan/atau Pasal 50 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa: | Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (11), Pasal 10, Pasal 12 ayat (4), ayat (10), Pasal 13C ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 29A ayat (1), ayat (7), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 37 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), ayat (5), ayat (8), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), ayat (3), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (2A), ayat (3), ayat (6), Pasal 44A ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 49 dan/atau Pasal 50 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; dan/atau | 1. peringatan tertulis; dan/atau |  |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. | 1. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. |  |  |  |  |
| 1. OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai kondisi Perusahaan membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung. |  |  |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa: |  |  |  |  |  |
| 1. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu; |  |  |  |  |  |
| 1. dihapus; |  |  |  |  |  |
| 1. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 55A |  | Cukup jelas. |  |  |  |
| Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), OJK dapat: |  |  |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau |  |  |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 56 |  |  |  |  |  |
| Dihapus. |  | Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal 57 | \*dicabut POJK 22/2024 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf a atau huruf b dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap laporan. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pasal II | Pasal II |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi, dan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu Pihak atau beberapa Pihak yang terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi, tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini berlaku. | Perusahaan yang melanggar ketentuan batasan investasi pada Pihak Terkait wajib menyesuaikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku. |  |  |  |  |
| 1. Penempatan investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang, dengan memenuhi ketentuan: | Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan |  |  |  |  |
| 1. pinjaman tersebut diberikan kepada perorangan; |  |  |  |  |  |
| 1. pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama; |  |  |  |  |  |
| 1. pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |  |  |  |
| 1. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan; |  |  |  |  |  |
| 1. besarnya setiap pinjaman paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak; dan |  |  |  |  |  |
| 1. pembatasan atas investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal polis asuransi PAYDI dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri yang diterbitkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang polis atau tertanggung PAYDI dengan mata uang rupiah yang belum memiliki Subdana tersebut. |  |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Subdana yang dibentuk sebelum Peraturan OJK ini berlaku terdapat investasi berupa reksa dana yang memiliki aset yang mendasari (underlying asset) selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6), Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi Subdana pada reksa dana tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang polis atau tertanggung yang belum memiliki Subdana tersebut. |  |  |  |  |  |
| 1. Bagi Perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku: |  |  |  |  |  |
| 1. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) mulai berlaku sejak 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku; dan |  |  |  |  |  |
| 1. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (5) huruf a untuk pertama kali disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan untuk periode yang dimulai 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah menempatkan investasi dengan melampaui batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat Peraturan OJK ini berlaku harus menyelesaikan pelampauan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku. |  |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Subdana dalam bentuk MTN yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau reksa dana penyertaan terbatas yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tidak harus menyesuaikan investasi pada MTN tersebut namun tidak diperkenankan menambah penempatan investasi pada MTN dan/atau reksa dana penyertaan terbatas tersebut. |  |  |  |  |  |
| 1. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), dinyatakan tidak berlaku; |  |  |  |  |  |
| 1. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |  |  |

**Perubahan Substansi :**

1. Penambahan Pasal 6 ayat (11)
2. Mengahapus Pasal 11 ayat (1) huruf l
3. Penambahan Pasal 12 ayat (1a)
4. Menghapus Pasal 12 ayat (8)
5. Menghapus Pasal 13 ayat (1) huruf j
6. Penambahan Pasal 13 ayat (1a)
7. Perubahan Pasal 13 ayat (5) huruf a
8. Penambahan Pasal 13B ayat (2) huruf d dan ayat (4)
9. Perubahan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c
10. Perubahan Pasal 20 ayat (4)
11. Perubahan Pasal 28
12. Menghapus Pasal 29 ayat (1)
13. Perubahan Pasal 29A ayat (1) dan menghapus ayat (6)
14. Perubahan Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1)